

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Upaya identifikasi permasalahan strategis perlu dilakukan sebagai bagian dari penyusunan rencana strategis. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanannya adalah :

1. Urusan Penanaman Modal

Dalam melaksanakan urusan Penanaman Modal, permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

- a. Belum adanya informasi peluang penanaman modal yang mendetail dan akurat
- b. Belum adanya kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kota Padang Panjang
- c. Belum terlaksananya promosi penanaman modal yang massif dan tepat sasaran
- d. Belum adanya kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan peluang kepada masyarakat/investor dalam pendanaan pembangunan kota
- e. Keterbatasan ruang/lahan untuk penanaman modal.

2. Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan dalam urusan tenaga kerja adalah:

- a. Masih rendahnya jumlah wirausahawan baru sebagai potensi untuk penyediaan lapangan kerja
- b. Meningkatnya jumlah pengangguran karena kurangnya kesempatan kerja
- c. Belum maksimalnya kualitas dan jaringan kerjasama tenaga kerja keluar negeri dan antar daerah
- d. Masih rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Walikota Padang Panjang Tahun 2018-2023 yang tertuang di dalam RPJMD Kota Padang panjang adalah : **"Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat"**. Visi tersebut ditopang dengan beberapa misi yang perlu secara konsisten dijalankan dalam RPJMD Kota Padang Panjang . Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi unggulan daerah berbasis pembangunan berkelanjutan
2. Meningkatkan pemerataan kualitas daya saing SDM masyarakat yang berakhlak dan berbudaya
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang responsif, inovatif dan partisipatif

Dari ketiga misi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang mendukung misi pertama dan ketiga dengan melaksanakan program pembangunan yang bertujuan untuk :

1. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

3.3 Telaahan Renstra Propinsi (Program Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi)

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terpadu dan bersinergi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah, diperlukan sinkronisasi prioritas nasional dan daerah. Untuk itu perlu digambarkan terlebih dahulu visi dan misi serta prioritas pembangunan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019, yang merupakan tahap ke tiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025

Misi yang diusung dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera dan Berbudaya”**. Visi ini merupakan penjabaran dari visi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2025 yaitu **“Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumber Daya Manusia Yang Agamais Pada Tahun 2025”**.

Sedangkan untuk mencapai visi tersebut ditetapkan lima misi yakni;

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya, berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah;
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional, global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah;

5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan visi misi tersebut di bidang ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Sumatera Barat merumuskan tujuan dan sasaran antara lain:

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-	
				2016	2017
1.	Mewujudkan tenaga kerja yang terampil/kompeten dan produktif untuk mengisi kesempatan kerja di dalam dan luar negeri.	1. Meningkatnya tenaga kerja yang kompeten.	1. % Tenaga kerja yang berkompoten	58,15 %	44,31 %
			2. % Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Terakreditasi.	11,36 %	12,02 %
2.	Mewujudkan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri, serta pengembangan kesempatan kerja melalui usaha mandiri.	1. Meningkatnya serapan tenaga kerja	1. % Serapan tenaga kerja sektor formal	17,43 %	19,04 %
			2. % Serapan tenaga kerja sektor informal	87,20 %	11,49 %
3.	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif, serta pengawasan norma	1. Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	1. % Penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	4,87 %	4,73 %
			2. % Peningkatan tenaga kerja yang menjadi peserta program BPIS Ketenagakerjaan	6,86 %	7,07 %
		2. Meningkatnya pengawasan Ketenagakerjaan, K3 serta perlindungan pekerja/buruh.	1. % Kepatuhan perusahaan yang melakukan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan	48,82 %	48,92 %

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kecenderungan perkembangan tata ruang wilayah Kota Padang panjang pada saat ini maupun dimasa yang akan datang didasarkan atas potensi dan masalah yang ada di Kota Padang Panjang

Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTRW terdiri atas:

1. Rencana Struktur Ruang, berkaitan dengan Rencana Sistem Pusat Pemukiman dan Rencana Sistem Jaringan Prasarana.
2. Rencana Pola Ruang, berkaitan dengan peruntukan kawasan Lindung dan peruntukan kawasan Budidaya.

Dalam hal ini, DPM & PTSP mempunyai keterkaitan dengan Rencana Pola Ruang yang berkaitan dengan Program Perwujudan Kawasan Lindung dan Program

Perwujudan Kawasan Budidaya, namun dapat dikatakan bahwa keterkaitan tidaklah bersifat langsung. Pengaruh Rencana Pola Ruang yang memiliki keterkaitan terhadap Kebutuhan Pelayanan DPM & PTSP Kota Padang Panjang Sebagai pedoman didalam pengembangan penanaman modal dan pemanfaatan ruang/wilayah untuk lokasi kegiatan penanaman modal;

Dalam pembangunan kedepannya Dinas PM dan PTSP lebih diarahkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penanaman modal hendaknya tidak menjadi ancaman ketika dominasi asing dalam perekonomian sudah terlalu besar, sehingga akan menggeser kekuatan pelaku ekonomi domestik. Untuk itulah dukungan regulasi begitu krusial. Masyarakat jangan dibiarkan hanya menjadi penonton atas perkembangan kegiatan penanaman modal yang ada di wilayahnya.

Disadari pula bahwa penanaman modal membutuhkan infrastruktur dan daya dukung Sumber Daya Alam (SDA) maupun SDM yang memadai; bila salah satu tidak tersedia, maka potensi yang ada di daerah akan sulit berkembang. Terkait dengan infrastruktur, permasalahan penanaman modal sangat bersinggungan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Lemahnya implementasi RTRW di Indonesia membuat daya saing penanaman modal menjadi rendah.

Prioritas penanaman modal seperti yang ditegaskan dalam RUPM perlu terus dikembangkan dengan mengarah pada peningkatan nilai tambah produk. Misalnya saja dalam hal pangan, sektor agribisnis sangat penting untuk dikembangkan ke depan. Alasannya sederhana, negara agraris di dunia ini sangat terbatas sehingga potensi agribisnis akan sangat prospektif. Untuk itu harus ada kebijakan lahan pertanian abadi. RTRW harus diimplementasikan dengan baik agar lahan pertanian terselamatkan dari modernisasi pembangunan.

Disadari pula bahwa Renstra dapat mendorong sektor-sektor penanaman modal yang mampu mempercepat terjadinya pemerataan penanaman modal. Dengan fokus pada sektor yang mendorong pemerataan, maka pertumbuhan penanaman modal akan cepat dicapai. Di tingkat daerah masih banyak ditemui fakta adanya kesulitan dalam memulai usaha. Banyak “biaya siluman” yang harus dikeluarkan untuk berbisnis, baik di lingkungan birokrasi pemerintah maupun nonpemerintah.

Penanam modal dijejali berbagai peraturan yang perubahannya begitu cepat. Peraturan Daerah (Perda) berubah seiring dengan pergantian kepala daerah. Hambatan penanaman modal semakin menjadi-jadi. Permasalahan di daerah semakin rumit ketika diimplementasikannya otonomi daerah. Daerah berlomba-lomba memacu Pendapatan

Asli Daerah (PAD) yang secara langsung maupun tidak langsung menciptakan ekonomi biaya tinggi.

Permasalahan sektoral penanaman modal selama ini juga terkait dengan minimnya penguasaan teknologi. Teknologi pada sejumlah industri masih tradisional. Penguasaan teknologi di Indonesia masih rendah, mulai tahapan produksi hingga pemasaran produk. Ini menyebabkan nilai tambah produk relatif kecil. Penerapan teknologi dapat diadopsi dari kegiatan PMA. Namun, kita cenderung lambat dalam memanfaatkan berbagai peluang yang ada. Di sisi lain, pemetaan potensi asli daerah semakin mendesak dilakukan, terutama menyangkut bagaimana pemanfaatannya secara maksimal. Menyangkut kegiatan penanaman modal di daerah, terdapat dua masalah utama, yaitu bagaimana menumbuhkan penanaman modal baru dan bagaimana memantapkan kegiatan penanaman modal yang sudah ada dalam jangka panjang.

Dalam kaitannya dengan ketimpangan sektoral dan regional, inisiasi pemerintah dalam membentuk KEK menjadi salah satu upaya mengurangi ketimpangan penanaman modal regional. Pemerintah harus mulai memikirkan pembukaan KEK di luar Jawa untuk mengurangi konsentrasi penduduk Jawa, sekaligus untuk membuka peluang penanaman modal. Selain itu, perlunya meningkatkan PTSP sebagai upaya untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan.

Permasalahan Pelayanan PM dan PTSP Kota Padang Panjang berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong.

Faktor Penghambat :

1. Minimnya data dan informasi pendukung yang terkait dengan tata ruang
2. Terbatasnya SDM perencana yang memiliki kompetensi di dalam penyusunan dokumen rencana tata ruang
3. Adanya Peraturan Menteri Kehutanan tentang Usulan Perubahan Kawasan Hutan.

Faktor Pendorong :

1. Adanya UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
2. Adanya peraturan penyusunan dokumen perencanaan yang harus mengacu kepada RTRW.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Isu-isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, beberapa isu strategis yang perlu menjadi pertimbangan di dalam menyusun Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kegiatan promosi investasi secara terpadu antar SOPD dan antar Kabupaten/Kota
2. Terbatasnya Lahan di Kota Padang Panjang dalam berinvestasi.
3. Distribusi tenaga kerja terdidik yang belum maksimal
4. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
5. Keterbatasan sumber daya manusia pada DPM dan PTSP baik secara kualitas maupun kuantitas.

Berbagai isu strategis yang dikemukakan di atas, sangat diperlukan dalam merumuskan kebijakan perencanaan pelayanan di daerah, terutama didalam merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang diinginkan lima tahun kedepan. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang prima dan berkualitas melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM, memantapkan kelembagaan, serta koordinasi dan komunikasi antar stakeholder. Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut :

- a. Perlu adanya usaha untuk meningkatkan Promosi Investasi sehingga Investor tertarik menanamkan modalnya di Padang Panjang.
- b. Perlu adanya Koordinasi dengan dinas terkait mengenai lahan yang terbatas untuk investasi.
- c. Perlu memanfaatkan Koneksi yang tersedia dalam penyaluran tenaga kerja
- d. Meningkatkan kuantitas diklat-diklat keahlian terhadap angkatan kerja.
- e. Menyelenggarakan Pelayanan Perizinan berbasis Online.
- f. Meningkatkan kualitas SDM DPM & PTSP dengan mengadakan pelatihan-pelatihan atau seminar.